

## Kehidupan Anak Jalanan pada Total Institution UPTD Kampung Anak Negeri

Della Puspita Anggraeni<sup>1</sup> dan Sugeng Harianto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISH-Unesa  
della.18026@mhs.unesa.ac.id

### Abstract

*The empowerment of street children in Surabaya through the Surabaya City Social Service has created an institution for sheltering socially disadvantaged children, namely UPTD Kampung Anak Negeri. Street children are fostered to increase their potential and change their self-image to become normative and independent. Discussing life behind UPTD Kampung Anak Negeri, there is behavior determined by the institution. Street children recognize the institution and show actions in accordance with and against its rules. This research uses a qualitative approach with the perspective of Erving Goffman's Total Institution Theory to analyze the data. The results showed that UPTD Kampung Anak Negeri has a big influence on fostered children. Unharmonious family factors trigger the entry of children into this institution. In it, strict social control is created through rules and punishments, shaping children's behavior. Their identity is transformed into "inmates," leading to a loss of autonomy and stigmatization. Interpersonal conflicts between staff create social tension, and children's behavior is influenced by social control, strict schedules, and CCTV surveillance. Coaches have a key role, but shortcomings in their approach need to be addressed. Exploitation by regular children of catch-up children is an important issue. Leadership changes can create uncertainty. Three forms of discipline are in place, but ineffective job desk implementation and changing rules challenge discipline. In conclusion, UPTD Kampung Anak Negeri plays a major role in controlling children's behavior, but challenges and weaknesses need to be addressed to improve its effectiveness.*

**Keywords:** *Street Children, Total Institutions, UPTD Kampung Anak Negeri.*

### Abstrak

Pemberdayaan anak jalanan di Surabaya melalui Dinas Sosial Kota Surabaya membuat institusi penampungan anak bermasalah sosial yaitu UPTD Kampung Anak Negeri. Anak jalanan dibina untuk meningkatkan potensi, mengubah citra diri mereka menjadi normatif, dan mandiri. Membahas kehidupan dibalik UPTD Kampung Anak Negeri terdapat perilaku yang ditentukan institusi. Anak jalanan mengenal institusi dan menunjukkan tindakan yang sesuai dengan dan menentang aturannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif Teori Total Institution Erving Goffman untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD Kampung Anak Negeri berpengaruh besar terhadap anak-anak binaan. Faktor keluarga yang tidak harmonis memicu masuknya anak-anak ke lembaga ini. Di dalamnya, kontrol sosial ketat tercipta melalui aturan dan hukuman, membentuk perilaku anak-anak. Identitas mereka diubah menjadi "narapidana," menyebabkan kehilangan hak otonomi dan stigmatisasi. Konflik interpersonal antar staf menciptakan ketegangan sosial, dan perilaku anak-anak dipengaruhi oleh kontrol sosial, jadwal ketat, dan pengawasan CCTV. Pembina memiliki peran kunci, tapi kekurangan dalam pendekatan mereka perlu diatasi. Eksploitasi oleh anak reguler terhadap anak kejar paket menjadi isu penting. Perubahan kepemimpinan dapat menciptakan ketidakpastian. Tiga bentuk pendisiplinan diterapkan, tapi implementasi job desk yang tidak efektif dan aturan yang berubah-ubah menantang kedisiplinan. Kesimpulannya, UPTD Kampung Anak Negeri berperan besar dalam mengendalikan perilaku anak-anak, namun tantangan dan kelemahan perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

**Kata Kunci:** Anak Jalanan, Institusi Total, UPTD Kampung Anak Negeri.

### 1. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara berkembang, secara aktif melaksanakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang tersebut tidak hanya mengamanatkan perlindungan bagi seluruh bangsa Indonesia, tetapi juga menekankan pada pemajuan kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa. Dalam konteks ini, sumber daya manusia menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan nasional tersebut, dan persiapan sumber daya manusia

sejak dini menjadi suatu keharusan yang tak terelakkan. Namun, perkembangan pesat dalam pola kehidupan pembangunan perkotaan seringkali tidak sejalan dengan kemajuan kualitas dan kapasitas kota itu sendiri. Afifuddin (2014) [1] mencatat bahwa dampak positif dan negatif pembangunan sulit dihindari. Oleh karena itu, perjuangan terus diperlukan untuk mengembangkan dampak positif dan mengurangi dampak negatifnya. Sebagai contoh, Kota Surabaya, dengan kepadatan penduduk tinggi, rentan terhadap munculnya masalah sosial perkotaan, terutama anak jalanan. Anak jalanan menjadi salah satu fenomena krusial yang menandakan adanya konflik kesejahteraan sosial yang perlu perhatian serius dari pemerintah. Permasalahan ini tidak hanya mencakup aspek kesejahteraan, tetapi juga melibatkan hak-hak anak yang sering diabaikan. Pemerintah Kota Surabaya telah merumuskan Peraturan Daerah dan MOU dengan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk kerjasama dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, khususnya anak jalanan.

Secara keseluruhan, ada sekitar 3.367 anak jalanan dan anak terlantar di setiap kecamatan Kota Surabaya, dengan 3.312 anak terlantar dan 55 anak jalanan (Dinas Sosial Kota Surabaya, 2023) [2]. Dalam data tersebut terdapat 31 Kecamatan, di antaranya yaitu Asemrowo jumlah anak terlantar 77 jiwa, Benowo jumlah anak terlantar 97 jiwa, Bubutan jumlah anak terlantar 248 jiwa dan anak jalanan 7 jiwa, Bulak jumlah anak terlantar 66 jiwa, Dukuh Pakis jumlah anak terlantar 38 jiwa, Gayungan jumlah anak terlantar 42 jiwa, Genteng jumlah anak terlantar 88 jiwa, Gubeng jumlah anak terlantar 111 jiwa dan anak jalanan 1 jiwa, Gunung Anyar jumlah anak terlantar 63 jiwa, Jambangan jumlah anak terlantar 52 jiwa, Karangpilang jumlah anak terlantar 39 jiwa, Kenjeran jumlah anak terlantar 231 jiwa, Krembangan jumlah anak terlantar 101 jiwa dan anak jalanan 1 jiwa, Lakarsantri jumlah anak terlantar 68 jiwa, Mulyorejo jumlah anak terlantar 31 jiwa dan anak jalanan 5 jiwa, Pabean Cantian jumlah anak terlantar 42 jiwa, Pakal jumlah anak terlantar 89 jiwa, Rungkut jumlah anak terlantar 125 jiwa dan anak jalanan 20 jiwa, Sambikerep jumlah anak terlantar 128 jiwa, Sawahan jumlah anak terlantar 244 jiwa dan anak jalanan 1 jiwa, Semampir jumlah anak terlantar 59 jiwa dan anak jalanan 5 jiwa, Simokerto jumlah anak terlantar 96 jiwa, Sukolilo jumlah anak terlantar 93 jiwa dan anak jalanan 3 jiwa, Sukomanunggal jumlah anak terlantar 76 jiwa, Tambaksari jumlah anak terlantar 187 jiwa dan anak jalanan 1 jiwa, Tandes jumlah anak terlantar 210 jiwa, Tegalsari jumlah anak terlantar 108 jiwa, Tenggiling Mejoyo jumlah anak terlantar 80 jiwa dan anak jalanan 2 jiwa, Wiyung jumlah anak terlantar 79 jiwa, Wonocolo jumlah anak terlantar 148 jiwa dan anak jalanan 4 jiwa, Wonokromo jumlah anak terlantar 196 jiwa dan anak jalanan 5 jiwa.

Untuk mengatasi masalah anak jalanan di Surabaya, Pemerintah Kota membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri. UPTD ini bertujuan memberikan pelayanan sosial kepada anak-anak yang putus sekolah, hasil penjangkauan, dan anak terlantar atau berasal dari keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Meskipun upaya ini telah dilakukan, jumlah anak yang dapat ditampung masih terbatas, mengingat besarnya jumlah anak jalanan, nakal, dan terlantar di Surabaya. Tujuannya adalah meningkatkan kemandirian mereka melalui intervensi seperti bimbingan mental dan spiritual, jasmani, bakat minat, kognitif, dan sosial. Pelaksanaan kegiatan anak jalanan sering kali kurang disiplin karena kebiasaan hidup bebas yang sulit diubah. Pembina dan pendamping berusaha keras merubah perilaku anak jalanan, namun mereka tetap merasa memiliki *circle* tersendiri. Komunikasi antara anak jalanan dan pembina atau pendamping seringkali dipengaruhi oleh perbedaan relasi kuasa, hegemoni, dan konstruksi sosial yang membuat anak jalanan cenderung menjaga batasan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kehidupan anak jalanan, perilaku anak jalanan, peran pembina dan pendamping, serta aturan yang menjadi acuan perlakuan di UPTD Kampung Anak Negeri.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli, terdapat pemahaman mendalam terkait kondisi anak jalanan, khususnya yang terfokus di UPTD Kampung Anak Negeri Cahyadhi dkk (2021) [3], menyelidiki kondisi anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas program kesejahteraan masih kurang maksimal karena rendahnya kesadaran dan motivasi anak jalanan untuk memperbaiki hidup mereka sendiri. Shafira dan Soedirham (2017) [4] menemukan perubahan positif dalam konsep diri anak-anak binaan, yang awalnya dianggap terlantar. Purnomo (2017) [5] menyoroti peran krusial pekerja sosial dalam meningkatkan kemandirian anak jalanan melalui pelatihan. Agustin & Nugroho (2017) [6] menemukan progres signifikan dalam kemampuan keaksaraan anak jalanan melalui bimbingan sosial. Wati dan Qomaruddin (2020) [7] meneliti kepatuhan peraturan tanpa rokok, menunjukkan hubungan erat antara anak binaan dan rekan asuh, tetapi kepatuhan masih rendah. Diperlukan pengawasan lebih lanjut untuk mencapai tingkat kepatuhan yang lebih baik.

Perspektif sosiologi melihat anak sebagai bagian dari masyarakat, mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial, termasuk keluarga dan masyarakat luas (Kartasapoetra, 1992) [8]. Fenomena anak jalanan disebabkan utamanya oleh masalah ekonomi, yang berdampak pada faktor-faktor pendidikan, kultural, dan struktural, seperti yang diuraikan oleh Mugianti dkk (2018) [9]. Kendala ekonomi menjadi akar utama, menghalangi akses anak jalanan ke pendidikan, membuat sistem pendidikan tidak dapat mencakup mereka. Faktor kultural menyumbang pada siklus kemiskinan yang terus berulang, dengan anak jalanan terperangkap dalam budaya kemiskinan dan pola hidup harian. Sementara itu, faktor struktural, terkait erat dengan masalah ekonomi, memerlukan analisis mendalam untuk menangani akar permasalahan anak jalanan, melibatkan regulasi, tindakan aparat, dan solusi struktural lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Suyanto (2010) [10].

### 2.2 Masalah-Masalah Sosial Anak Jalanan Dalam Perspektif Teori

Dalam perspektif patologi sosial, masyarakat modern dianggap sebagai "organisme besar" dengan kebutuhan khusus (Julian, 1986:12) [11]. Bagi anak jalanan, akar masalah terletak pada faktor keluarga seperti ketidakharmonisan dan perceraian, mendorong mereka keluar dari sekolah dan mengadopsi perilaku eksploratif (Poloma, 1987:25) [12]. Sedangkan perspektif *labelling* fokus pada cara masyarakat memberi label pada tindakan sebagai masalah sosial (Parillo, 1987:30) [13]. Label yang diberikan masyarakat pada seseorang dapat mengubah interpretasi si aktor terhadap tindakan tersebut, mengarah pada perubahan pandangan dan menghindari tindakan tersebut.

### 2.3 UPTD Kampung Anak Negeri Perspektif Teori Total Institution

Teori pengembangan Erving Goffman, yang mencetuskan Teori Dramaturgi dan berkembang hingga Teori Total Institution, dijelaskan dalam karyanya "*Asylums: Essays on the Social Institution of Mental Patients and Other Inmates*" (Goffman dalam Sugeng Puji Leksono, 2010: Vol 13 No. 1) [14]. Rumah singgah, sebagai bentuk institusi total, memuat anak jalanan dengan aturan dan norma yang ketat. Goffman (1963) [15] menjelaskan bahwa institusi total berusaha merubah perilaku individu melalui aturan internal yang ketat. Penjara, sebagai contoh institusi total, hadir untuk mereformasi perilaku narapidana agar bersikap lebih baik dan normatif setelah keluar. Institusi total, seperti UPTD Kampung Anak Negeri, mengacu pada pembatasan praktik sosial individu di dalamnya. Goffman

menyoroti lima karakteristik institusi total, termasuk perlindungan masyarakat dan pembinaan generasi. Di dalamnya, ada tiga komponen khas: *inmates*, *staff*, dan aturan sebagai panduan perilaku.

Pada UPTD Kampung Anak Negeri, anak jalanan menjalani kehidupan yang diatur ketat oleh pembina dan pendamping, mengubah penampilan dan perilaku mereka sesuai norma lembaga. Ketergantungan anak binaan pada lembaga tercermin dalam hierarki dan kekuasaan yang terjadi di dalamnya. Anak binaan UPTD Kampung Anak Negeri mempersepsikan lembaga tersebut sebagai tempat bermain, kantor, dan tempat nyaman, meskipun psikologis dan sosial mereka awalnya merasa tidak nyaman dan membosankan. Persepsi ini menggambarkan sifat eksploitatif lembaga pembinaan, terutama dirasakan oleh anak binaan.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merangkul pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan perspektif teori Total Institution oleh Erving Goffman. Pendekatan kualitatif, sebagaimana didefinisikan oleh Sadewo (2016) [16], tidak hanya dianggap sebagai titik awal dalam proses penelitian, tetapi juga dibangun melalui data yang diperoleh secara analitis dan sistematis melalui metode komparatif. Perspektif teori Erving Goffman tentang total institution digunakan untuk menganalisis UPTD Kampung Anak Negeri sebagai lembaga yang membatasi perilaku anak jalanan melalui proses birokratis, mengisolasi mereka secara fisik dari aktivitas normal sekitarnya. Di dalam UPTD tersebut, anak jalanan mengalami kesenjangan sosial yang signifikan antara penguasa dan yang dikuasai, dengan mobilitas sosial yang sangat terbatas.

Dalam proses penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua sumber utama: primer dan sekunder. Observasi lapangan, wawancara mendalam, pencatatan lapangan, dan dokumentasi membentuk data primer, sementara arsip dokumen, buku, *e-book*, website, berita online, artikel ilmiah, dan jurnal menjadi sumber data sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, menekankan gambaran mendetail dari wawancara mendalam dan dokumentasi.

Proses analisis data mengikuti model Milles dan Huberman (Milles dan Huberman, 1992:18) [17], mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga melibatkan penggunaan *Handphone* sebagai alat perekam suara selama wawancara di lokasi, dengan rekaman yang kemudian ditranskripsi ke dalam catatan lapangan. Hasil analisis data disajikan melalui teks deskriptif, mencakup kutipan dari catatan lapangan dan transkrip wawancara. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui tahap verifikasi, di mana kesimpulan awal dievaluasi kembali dengan bukti yang lebih kuat. Proses verifikasi kesimpulan dilakukan dengan teliti. Kesimpulan utama terkait kehidupan anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri membentuk dasar untuk tindakan selanjutnya.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Kondisi Objektif Kehidupan Anak Binaan

Di UPTD Kampung Anak Negeri, mayoritas anak binaan berasal dari keluarga *Broken Home*, dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan lingkungan. Hal ini memicu perubahan temperamental pada anak binaan, bertentangan dengan harapan akan kehangatan dan keharmonisan keluarga. Dalam perspektif patologi sosial, tekanan untuk mencari nafkah sendiri, rendahnya pendidikan, dan lingkungan yang memicu pelanggaran norma sosial menjadi faktor risiko. UPTD ini menampung sekitar 37 anak dengan anggaran tahunan sebesar 3–4 Miliar, bersumber dari Dinas Sosial Kota Surabaya. Goffman menggambarkan UPTD sebagai institusi total, dengan standar penghuni

berdasarkan kriteria anak jalanan, anak terlantar, dan anak nakal. Hidup di UPTD dianggap membosankan, tidak nyaman, dan terbatas oleh aturan, yang membuat beberapa anak berniat untuk kabur, mencerminkan analisis dari perspektif Total Institution.

a. Kehidupan Seperti di Penjara dan Pesantren

Penjara, menurut Teori Total Institution Goffman (1963), merujuk pada pembatasan anak oleh aturan dan kebiasaan dengan tembok, pagar, dan isolasi sosial. Mereka, dalam institusi total, dipisahkan dari masyarakat oleh atribut fisik, menciptakan suatu sistem sosial tertutup yang memerlukan izin untuk masuk dan keluar. Tujuannya adalah menyosialisasikan kembali individu ke dalam perubahan identitas dan peran baru. Dalam konteks penjara, hubungan homoseksual antar narapidana laki-laki menjadi budaya yang lumrah, di mana narapidana muda sering kali menjadi korban penyimpangan seksual oleh narapidana dewasa. Sama halnya di UPTD Kampung Anak Negeri, fenomena ini tercermin dalam kasus sodomi dan hubungan homoseksual antar anak binaan. Perilaku ini menciptakan budaya menyimpang dan trauma berkepanjangan di antara pelaku dan korban. Meskipun kasus ini tidak terjadi sering, setiap tahunnya terdapat insiden serupa, seperti yang dialami oleh Vino dan Kiki. Meskipun upaya sekat fisik diimplementasikan, mereka tidak efektif menyelesaikan permasalahan ini. Penanganan internal oleh UPTD Kampung Anak Negeri dan Dinas Sosial Kota Surabaya menjadi metode penyelesaian yang cenderung tertutup. Analisis Teori Total Institution oleh Goffman mengidentifikasi empat karakteristik utama di UPTD Kampung Anak Negeri. Fitur Totalistik menciptakan pemisahan antara anak binaan dan kehidupan sehari-hari, sementara Proses Mortifikasi menyebabkan kehilangan identitas individu mereka. Sistem Hak Istimewa memberikan penghargaan kepada yang patuh, dan Keberpihakan Adaptasi menggambarkan upaya anak binaan untuk beradaptasi dengan lingkungan tersebut.

Sedangkan kehidupan seperti di pesantren dapat meminjam dari pernyataan Taufik Abdullah (1993:329) [18], pesantren adalah wadah untuk membentuk manusia baik melalui sistem asrama. Di UPTD Kampung Anak Negeri, fenomenanya hampir mirip dengan pondok pesantren, dengan asrama dan kepemimpinan asrama. Setiap asrama memiliki ketua yang bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan. Anak binaan bisa pulang saat liburan, menetap dengan sistem semi-pondok yang memungkinkan pulang sewaktu-waktu. Kegiatan pendidikan berbasis keagamaan juga sama, termasuk ibadah harian dan pelajaran agama seperti aqidah, ibadah, tarikh, Al-Qur'an, dan hadits. Konflik di UPTD Kampung Anak Negeri mirip dengan lembaga pendidikan lainnya. Anak-anak sering mencuri dan terlibat konflik agresi verbal. Penyelesaian konflik melibatkan tindakan hukuman, baik dari pihak UPTD maupun sesama anak-anak binaan. Ada kecenderungan untuk mengucilkan dan memberikan hukuman fisik agar pelaku kapok. Analisis menurut Goffman menunjukkan bahwa UPTD Kampung Anak Negeri adalah institusi total dengan struktur hierarki dan kendali kekuasaan. Pembina, pendamping, pengelola, keamanan, dan staf lainnya membentuk hirarki yang jelas. Aktivitas sehari-hari diatur ketat dan diawasi oleh sistem formal. Terdapat peraturan dan sanksi yang jelas, serta pengawasan CCTV untuk mencegah pelanggaran. Penelitian ini memperkuat konsep institusi total yang mencakup pendidikan, penjara, dan barak militer.

## 4.2 Perlakuan Anak Binaan

a. Pembatasan Ruang Gerak dan Kontrol Sosial

Anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri hidup terkungkung, diatur ketat, dan selalu didampingi. Aturan yang ketat mencakup larangan membawa barang berbahaya dan ruang pribadi

tidak diperbolehkan. Anak-anak binaan mendapat pelayanan dan pendampingan, serta terbatas dalam ruang gerak selama 24 jam. Banyak aturan yang harus dipatuhi, membuat mereka mudah beradaptasi. UPTD Kampung Anak Negeri dianggap sebagai bagian dari institusi total karena pembatasan ruang geraknya. Larangan termasuk penutupan total lantai 3 dan keluar hanya diperbolehkan ke lapangan futsal. Inilah yang mencerminkan bahwa institusi ini membatasi ruang gerak dan kenormalan internal, yang tidak terlihat dari luar.

Kontrol sosial di UPTD Kampung Anak Negeri terbagi antara pembina dan pendamping dengan anak binaan, serta antara anak binaan dengan lingkungan mereka. Konsep total institusi menunjukkan adanya kesenjangan antara penguasa dan yang dikuasai, menciptakan dua dunia berbeda di lembaga ini: dunia anak jalanan dan dunia pembina serta pendamping. Pembinaan karakter anak binaan dilakukan melalui kontrol sosial yang melibatkan Pembina Kognitif, Pendamping, dan Pembina Disiplin. Aktivitas berkumpul, pengerjaan tugas bersama, dan jadwal kegiatan menjadi metode pembentukan karakter. Pembinaan ini berlangsung melalui kegiatan berulang dan prinsip *learning by doing*. Kontrol sosial anak binaan juga melibatkan kerjasama dengan pihak Marinir TNI atau polisi. Ari, salah satu anak binaan, menjadi koordinator disiplin dengan pendampingan 24 jam. Meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang peran Ari, dia dianggap memegang kendali sosial di kalangan anak binaan. Ini sesuai dengan konsep Goffman tentang institusi total, di mana kontrol sosial dilakukan untuk menghindari penyimpangan perilaku dan memastikan ketaatan terhadap nilai dan norma.

Meminjam teori dari Travis Hirschi (1969) [19], kontrol sosial internal terdiri *Attachment* melibatkan sosialisasi dan kedekatan antara pendamping dan anak binaan, menciptakan komitmen dan adaptasi. *Commitment* menciptakan kesadaran akan masa depan dengan komitmen terhadap aturan dan hubungan intens dengan pembina. *Involvement* melibatkan partisipasi dalam kegiatan pembinaan, menurunkan kemungkinan tindakan melanggar hukum. *Believe* mencakup kepatuhan terhadap norma sosial dan aturan, membentuk pengendalian diri anak binaan. Dalam konteks ini, peran institusi kritis dalam mempengaruhi perilaku anak binaan dan kurangnya kontrol dapat meningkatkan kenakalan/penyimpangan.

#### b. Jadwal, Aturan Diperketat, dan Hukuman

Kekuasaan tidak lagi secara kejam menyentuh tubuh dalam bentuk hukuman fisik, melainkan menyebar di "tubuh masyarakat" melalui "mekanisme disiplin" seperti penjara, sekolah, dan rumah sakit (Hardiyanta, 1997) [20]. Penelitian ini menunjukkan adanya mekanisme *Panopticon* di UPTD Kampung Anak Negeri, di mana narapidana merasa diawasi, menjadikan mereka subordinat dan tunduk pada aturan penjara. Korelasi muncul dengan kehidupan anak-anak binaan yang merasa seperti hidup di penjara, terutama dengan adanya pengawasan modern berupa CCTV dan peran pembina serta pendamping sebagai wakil institusi yang memantau tanpa terlihat. Pembatasan ruang gerak anak binaan terkait dengan aturan yang diperketat akibat masalah perilaku. CCTV ditambahkan untuk meminimalisir perilaku penyimpangan sosial. Temuan data dari wawancara menunjukkan penambahan CCTV yang terletak di lobi depan dan belakang terdapat 1, di pojok tikungan kantor terdapat 1, di parkir terdapat 1, di lantai 2 terdapat 1, di lantai 3 terdapat 1, di lantai 1 terdapat 3 yaitu di ruang makan, lalu di kafe, dan di dapur. Pengetatan jadwal kegiatan untuk mencegah penyimpangan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri.

Hukuman di UPTD Kampung Anak Negeri mencakup penderitaan disengaja sebagai respons terhadap pelanggaran. Kontrol sosial antar anak binaan terjadi, di mana ketua mereka, Ari, memiliki peran penting dalam disiplin. Ari diberi kewenangan oleh pembina disiplin untuk menggantikannya

dan mengawasi perilaku anak-anak binaan. UPTD memiliki aturan ketat, dan Ari, sebagai ketua, bertanggung jawab memberikan hukuman sesuai pelanggaran. Sanksi dapat berupa kekerasan fisik, psikis, atau verbal, tergantung pada jenis pelanggaran norma sosial. Pelanggaran dapat termasuk *folkways*, *usage*, dan *mores*, dengan sanksi yang bervariasi. Ari menggunakan kekerasan fisik, psikis, dan verbal sebagai sanksi, namun UPTD menetapkan batasan untuk mencegah cedera serius. Meskipun aturan di UPTD ketat, hukuman yang diberikan harus bersifat edukatif, melibatkan tugas-tugas fisik seperti membersihkan kamar mandi. Dengan aturan yang ada, anak binaan merasa hidupnya lebih teratur meskipun terbatas. Pendidikan dan latihan di UPTD mirip dengan mendidik anak di rumah, dengan hukuman yang bersifat edukatif tanpa kekerasan fisik yang berlebihan.

### 4.3 Perilaku Pembina dan Pendamping

#### a. Tidak Tegas dan Cerewet

Sikap kepemimpinan melibatkan sifat-sifat yang mencirikan kualitas individu. Salah satu sikap penting adalah ketegasan, yang krusial untuk pengambilan keputusan yang tepat. Di UPTD Kampung Anak Negeri, ketidaktegasan pendamping berdampak negatif, memungkinkan perilaku semena-mena anak binaan dan bahkan memungkinkan mereka mengatur pemimpin mereka sendiri. Ketidaktegasan juga membuat pendamping dipandang remeh oleh anak binaan, yang merasa dapat memanipulasi keputusan. Seorang pendamping perlu memiliki ketegasan dalam pengambilan keputusan untuk membimbing anak binaan menuju tujuan yang diinginkan. Contoh di UPTD Kampung Anak Negeri mencakup situasi di mana pendamping kurang tegas terhadap kebijakan mencuci baju, menciptakan ketidakadilan di antara anak binaan. Ketidaktegasan juga terlihat dalam pengaturan jadwal dan ketidaksesuaian shift kerja dengan tugas memantau anak-anak pada malam hari. Pembina dan Pendamping di UPTD Kampung Anak Negeri sering dianggap cerewet karena selalu menginformasikan kegiatan, bertujuan agar anak binaan disiplin. Ini juga diartikan sebagai usaha memberikan nasihat sebagai refleksi dan motivasi. Kecenderungan cerewet terkait dengan kepribadian ekstrovert dan kebutuhan untuk berinteraksi. Pendekatan kognitif menunjukkan bahwa mereka memiliki tingkat aktivitas pemikiran tinggi dan dorongan untuk berbagi pengalaman. Faktor genetik dan lingkungan berperan, dengan keluarga yang ramah dapat mempengaruhi kecenderungan menjadi cerewet. Pembina dan pendamping cerewet cenderung mudah bergaul dan dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi anak binaan.

#### b. Eksploitasi Anak Reguler ke Anak Kejar Paket

Meminjam Teori dari Blau (1964) [21] menyatakan bahwa struktur sosial mengatur hubungan individu dan kelompok, melibatkan pertukaran sosial yang didasarkan pada kebutuhan. Anak-anak binaan reguler cenderung mengandalkan anak kejar paket untuk mencuci pakaian, menciptakan ketidaksetaraan sosial. Stratifikasi sosial di UPTD Kampung Anak Negeri mencakup senioritas dan perbedaan usia serta status pendidikan anak binaan. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan, dengan anak reguler memanfaatkan anak kejar paket, terutama dalam pekerjaan mencuci pakaian. Pengakuan terhadap kekuasaan menciptakan legitimasi, tetapi ketidaksetaraan dalam pertukaran sosial menyebabkan oposisi. Anak binaan kejar paket merasa tidak mendapat keuntungan dari mencuci pakaian anak reguler, menyebabkan ketidakpuasan dan tindakan melawan, seperti membuang atau menyembunyikan pakaiannya. Berdasarkan Teori Total Institution oleh Goffman, UPTD Kampung Anak Negeri bersifat eksploitatif, diperparah oleh ketidaktegasan dan kurangnya kedisiplinan pendamping.

#### 4.4 Aturan Sebagai Acuan Perlakuan

##### a. Aturan Yang Berubah-Ubah dan Implementasi Jobdesk Tidak Baik

Peraturan tertulis harus konsisten, namun, dalam praktiknya, staf seperti pembina dan pendamping perlu konsisten dalam penerapannya. Ketidaksesuaian dalam implementasi oleh beberapa staf dapat menyebabkan inkonsistensi aturan di UPTD Kampung Anak Negeri. Norma bersifat konsisten, melibatkan semua elemen di UPTD Kampung Anak Negeri, bukan hanya pembina dan pendamping. Ketidaksesuaian terkadang disebabkan oleh ketidakminatan staf terhadap pekerjaan di UPTD Kampung Anak Negeri. Pergantian pimpinan di UPTD Kampung Anak Negeri juga berdampak pada perubahan kegiatan dan program. Pembina dan pendamping memiliki indikator untuk mengukur perubahan perilaku anak binaan, tetapi pendapat mereka berbeda-beda. Pentingnya memiliki indikator bersama yang konsisten untuk keberhasilan dan implementasi yang sesuai dengan norma. Pembina melihat perubahan dari segi kedisiplinan dan perilaku beribadah, sementara pendamping menggunakan nilai rapor dan pengamatan. Meskipun anak binaan bertanggung jawab secara bertahap, indikator kognitif menunjukkan kognitif di bawah rata-rata. Pembina dan pendamping berperan sebagai agen resosialisasi melalui pembinaan berbasis religi, termasuk pengembangan kemandirian melalui pelatihan bakat dan minat. Anak binaan mendapatkan akses pendidikan formal dan nonformal untuk persiapan masa depan. Dalam konteks Teori Total Institution sebagai institusi total dalam personal *development* untuk mencapai kesuksesan di dunia kerja, kemandirian, dan pendidikan.

Hegemoni di UPTD Kampung Anak Negeri melibatkan pimpinan dengan staf, pembina dan pendamping, serta anak binaan senior dengan junior. Contohnya, pembagian jobdesk yang kadang membuat rancu karena saling mengerjakan tugas yang tidak sesuai. Misalnya, dalam hal penanganan pakaian, pendamping seharusnya meminta anak-anak binaan melipat baju, tetapi praktiknya menjadi tanggung jawab pembina. Konflik sering terjadi terkait pengkondisian anak binaan setelah kegiatan KBM, di mana pembina mengambil alih jobdesk pendamping. Jika staf terlalu campur tangan, konflik internal mungkin timbul di UPTD Kampung Anak Negeri. Berdasarkan Teori Total Institution Goffman (1963), pelembagaan total terlihat pada ketergantungan penghuni pada institusi UPTD Kampung Anak Negeri untuk menjamin keberlangsungan hidup. Ketergantungan muncul ketika aturan ditetapkan dan strategi diterapkan.

##### b. Pendisiplinan Anak Binaan

Goffman mengidentifikasi bahwa institusi total memiliki aturan ketat untuk sikap terhadap yang berada di dalamnya, juga sistem hak yang memberikan penghargaan untuk sikap baik. Ini berkorelasi dengan UPTD Kampung Anak Negeri, di mana aturan ketat diterapkan untuk mendisiplinkan anak-anak binaan. Disiplin adalah proses pengajaran untuk menanamkan kebiasaan, perilaku, atau sifat tertentu pada individu, terutama meningkatkan kualitas spiritual dan moral. Pendisiplinan, seperti halnya pembinaan, bimbingan, dan dorongan, dilakukan oleh pembina dan pendamping. Tujuannya adalah membentuk karakter anak binaan melalui program berbasis religi, pelatihan bakat, dan pendidikan formal serta nonformal. Proses ini juga melibatkan indikator untuk mengukur perubahan perilaku anak binaan.

Ada tiga bentuk pendisiplinan di UPTD Kampung Anak Negeri: permisif, otoriter, dan demokratis. Setiap pendekatan memberikan dampak yang berbeda pada anak binaan. Pendisiplinan permisif cenderung membuat anak lebih rentan terhadap perilaku buruk, sementara pendisiplinan

otoriter dapat menyebabkan keterampilan sosial yang buruk dan tingkat depresi yang lebih tinggi. Di sisi lain, pendisiplinan demokratis membuat anak lebih terbuka, mandiri, dan bertanggung jawab. Proses pengenalan norma dan aturan di UPTD Kampung Anak Negeri dilakukan melalui norma tertulis dan tidak tertulis. Pembacaan "Janji Anak Binaan Kampung Anak Negeri" menjadi bagian dari upaya ini. Orang tua atau keluarga anak binaan tidak mendetail mengetahui aturan UPTD Kampung Anak Negeri, karena penyerahan penuh pembinaan anak disertai kesepakatan tidak menuntut secara hukum terhadap pelaksanaan pembinaan. Anak binaan diminta mematuhi peraturan saat masuk UPTD Kampung Anak Negeri, sesuai dengan visi misi lembaga untuk membentuk anak yang mandiri dan normatif. Mandiri artinya mereka dapat bekerja dan tidak kembali ke jalanan, serta mematuhi norma masyarakat di mana pun mereka tinggal. Pelanggaran aturan berarti konsekuensi yang sesuai.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, Goffman menjelaskan bahwa dalam institusi total terdapat tiga elemen utama, yaitu *inmates* (orang yang diperlakukan), staf (orang yang memperlakukan), dan aturan sebagai panduan perilaku. Agen kontrol sosial, melibatkan keluarga, teman, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pembinaan, berperan dalam upaya mengontrol perilaku masyarakat. Anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri cenderung dipengaruhi oleh situasi internal keluarga yang penuh konflik, termasuk perceraian, pertengkaran, dan keberadaan orang tua tiri. Faktor ekonomi yang kurang mendukung mendorong setiap anggota keluarga mencari penghasilan sendiri. Lingkungan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi anak jalanan untuk melanggar norma masyarakat.

UPTD Kampung Anak Negeri memiliki dampak besar terhadap kehidupan anak-anak binaan. Faktor keluarga yang tidak harmonis menjadi pemicu utama masuknya anak-anak ke dalam institusi tersebut. Lingkungan di dalam UPTD Kampung Anak Negeri menciptakan kontrol sosial yang mengekang, dengan aturan ketat, pembatasan, dan hukuman yang berperan dalam membentuk perilaku anak-anak. Identitas anak binaan dihapus dan digantikan dengan identitas baru sebagai bagian dari "narapidana", yang dapat mengakibatkan kehilangan hak otonomi dan stigmatisasi. Konflik interpersonal antar staf menciptakan konflik sosial di dalam lembaga, dan perilaku anak-anak dipengaruhi oleh kontrol sosial yang ketat, jadwal kegiatan yang ketat, serta pengawasan melalui kamera CCTV.

Pembina dan pendamping memiliki peran penting dalam membentuk perilaku anak-anak, namun terdapat kelemahan dalam pendekatan mereka. Kekurangan ketegasan dan eksploitasi oleh anak reguler terhadap anak kejar paket menjadi isu yang perlu diperhatikan. Selain itu, perubahan pimpinan dapat mengubah kebijakan dan program lembaga, menciptakan ketidakpastian dalam aturan dan disiplin. Pendisiplinan di UPTD Kampung Anak Negeri dilakukan melalui tiga bentuk pendekatan, yaitu pendisiplinan demokrasi, pendisiplinan otoriter, dan pendisiplinan permisif. Namun, implementasi jobdesk yang tidak efektif dan aturan yang berubah-ubah menciptakan tantangan tambahan dalam menjaga kedisiplinan. Kesimpulannya, UPTD Kampung Anak Negeri memainkan peran besar dalam mengendalikan perilaku anak-anak binaan melalui kontrol sosial yang ketat, namun terdapat tantangan dan kelemahan dalam implementasi aturan dan pendekatan pendisiplinan.

## Daftar Pustaka

- [1] Afifudin, M. 2014. *Pembinaan Anak Jalanan Di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya*. Upn Veteran Jatim.

- [2] Dinas Sosial Kota Surabaya. 2023. (Anjal Dan Anak Terlantar, N.D.). Diakses pada 10 Januari 2023.
- [3] Cahyadi, B. B. N., Puspitasari, N. Z., Britania, D. A., & Wahyudi, K. E. (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(5), 731–742. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i5.153>.
- [4] Shafira, G. R., & Soedirham, O. 2017. Gambaran Dimensi Internal dalam Konsep Diri Anak Asuh UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya. *Jurnal Penelitian Kesehatan*, 15(2), 34–36.
- [5] Purnomo, M. A. 2017. Peran Pekerja Sosial Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan Melalui Pelatihan Melukis Di UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 01(02), 16.
- [6] Agustin, M., & Nugroho, R. 2017. Kemampuan Keaksaraan Anak Jalanan Melalui Bimbingan Sosial di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Surabaya. *E-Jurnal Unesa*, 1(2), 1–6.
- [7] Wati, M. D. M., & Qomaruddin, M. B. 2020. Analisis Kepatuhan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Pada Anak Asuh UPTD Kampung Anak Negeri. *Jurnal PROMKES*, 8(1), 99. <https://doi.org/10.20473/jpk.v8.i1.2020.99-110>.
- [8] Kartasapoetra, G. 1992. *Budidaya Tanaman Berkhasiat Obat*. Rineka Cipta, Jakarta.
- [9] Mugianti, S., Winarni, S., & Pangestuti, W. D. 2018. Faktor Penyebab Remaja Menjadi Anak Jalanan. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.31290/jpk.v7i1.292>.
- [10] Suyanto, B. 2010) *Masalah Sosial Anak*. Kencana Prenada Media Group.
- [11] Julian, Joseph, and William Kornblum. 1986. *Social Problems*, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs. New Jersey.
- [12] Poloma, Margaret M. 1987. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali. 23.
- [13] Parillo, Vincent, N, etal. 1987. *Contemporary Social Problems*. John Wiley and Sons. New York.
- [14] Leksono, Sugeng Puji. 2010. Runtuhnya Penjara Sebagai Institusi Sosial. *Sociology Vol. 13 No. 1*.
- [15] Goffman, E. 1963. *Stigma; Notes on the management of spoiled identity*. In Penguin Books. <https://doi.org/10.2307/2575995>.
- [16] Sadewo, S. F. 2016. *Meneliti Itu Mudah: Petunjuk Praktis untuk Melakukan Penelitian Sosial Kualitatif*.
- [17] Milles dan Huberman. 1992. “Analisis Data Kualitatif.” Jakarta: Universitas Indonesia Press, 16.
- [18] Abdullah, Taufik. 1993. *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali.
- [19] Costello, B. J., & Laub, J. H. 2020. *Social Control Theory: The Legacy of Travis Hirschi's Causes of Delinquency Annual Review of Criminology*.
- [20] Hardiyanta, Sunu. 1997. *Michael Foucault Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern*. Yogyakarta: LKIS.
- [21] Blau, P. M. 1964. *Exchange & power in social life*. New York, NY: John Wiley & Sons.